



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
BADAN KEUANGAN DAERAH

Alamat : Jl. KH. Wachid Hasyim No. 2 Karanganyar Telp. (0271) 495066 - 495138 Fax. (0271) 6491366
Website : www.bkd.karanganyarkab.go.id E-mail : bkd@karanganyarkab.go.id Kode Pos 57713

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KUANGAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR: 900/28.12/II/2024.

TENTANG
PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK TAHUN 2024
BADAN KEUANGAN DAERAH
KEPALA BADAN KUANGAN DAERAH

- Menimbang : a. Bahwa guna Melaksanakan Pasal 12 huruf g peraturan Bupati karanganyar Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan pelayanan Informasi dan Dokumentasi, Badan Keuangan Daerah kabupaten Karanganyar perlu menetapkan pengklasifikasian informasi publik dalam bentuk Daftar Informasi;
- b. Bahwa penetapan Daftar Informai Publik badan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud huruf a. ditetapkan dngan Surat keputusan Badan Keuangan Daerah kabupaten karanganyar
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tntanh keterbukaan informasi Publik (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran negara Rpublik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
4. Undang-Undang nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan (Lembaran Negara Republik Idonesia Tahun 2009 Nomor 112, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang standar Layanan Informasi Publik
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten

Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten karanganyara Nomor 67);

8. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 24 Tahun 2017 tentang pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (Brita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 24);

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA : Menetapkan Daftar Informasi Publik (DIP) pada Badan keuangan Daerah Tahun 2024
- KEDUA : Daftar Informasi Publik (DIP) sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA terdiri atas informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala dan informasi yang wajib tersedia setiap saat sebagaimana terlampir dan tidak terpisahkan dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Karanganyar
Pada tanggal : 12 Februari 2024

**KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR**



KURNIADI MAULATO, S.Sos., M. Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 197005101990031006

DAFTAR INFORMASI PUBLIK TAHUN 2024
BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR

A. INFORMASI YANG DIUMUMKAN SECARA BERKALA

No.	Judul Informasi (Nama Dokumen)	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat yang menguasai informasi	Penanggung Jawab Pembuatan Informasi	Waktu Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi Yang Tersedia	Jangka Waktu	Tempat Tersedianya Informasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Informasi Tentang Profil Badan Keuangan Daerah							
1.01	Kedudukan / domisili beserta alamat lengkap	a Alamat : JL. KH Wachid Hasyim No : 2 Karanganyar. b Telp : (0271) 495066 c Fax : (0271)6491366 d Email : bkd@karanganyarkab.go.id e Kode Pos : 57713	Kasubbag. Umum	PPID Pembantu	2024	Soft Copy Hard Copy	Selama Berlaku	www.bkd.karanganyarkab.go.id
1.03	Tugas dan Fungsi	1 Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang meliputi pendataan pengolahan dan penetapan penagihan keberatan dan pemeriksaan pajak anggaran, perbendaharaan dan kas 2 Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang meliputi pendataan pengolahan dan penetapan penagihan keberatan dan pemeriksaan pajak anggaran, perbendaharaan dan kas akuntansi dan aset daerah serta kesekretariatan 3 Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendataan pengolahan dan penetapan penagihan keberatan dan pemeriksaan pajak anggaran perbendaharaan dan kas daerah akuntansi dan aset daerah 4 Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dalam lingkup dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah 5 Pelaksanaan tugas laen yang di berikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya struktur organisasi	Kasubbag. Umum	PPID Pembantu		Hard copy	Selama Berlaku	www.bkd.karanganyarkab.go.id
1.04	Susunan Organisasi Badan Keuangan Daerah	1 Kepala Dinas 2 Sekretaris, membawahkan: a Subbagian umum 3 Bidang pendataan, pengolahan dan penetapan Membawahkan: a Seksi pendaftaran dan pendataan b Seksi pengolahan data, intensifikasi dan ekstensifikasi c seksi Penetapan 4 Bidang Penagihan. Keberatan dan Pemeriksaan Pajak Membawahkan:	Kasubbag. Umum	PPID Pembantu		Hard copy	Selama Berlaku	www.bkd.karanganyarkab.go.id

		a Seksi Penagihan b Seksi Keberatan dan Banding c Seksi Pemeriksaan 5 Bidang Anggaran, membawahkan a Seksi Perencanaan dan penyusunan Anggaran b Seksi pengendalian Anggaran 6 Bidang Perbendaharaan dan Kas daerah Membawahkan: a Seksi Perbendaharaan b Seksi Kas daerah 7 Bidang Akuntansi, Membawahkan: a Seksi Pembukuan, pelaporan dan informasi Keuangan b Seksi pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan 8 Bidang aset, membawahkan: a Seksi pengendalian dan Analisa Aset daerah b Seksi pengelolaan dan Pemanfaatan aset daerah c Seksi Penghapusan dan pemindah tanganan						
1.05	Informasi Pelayanan Publik	Berisi pelayanan yang ada di Badan Keuangan Daerah seperti : 1 Layanan Pajak Daerah 2 Aduan masyarakat	Kasubbag. Umum	PPID Pembantu		Hard copy		
1.06	SDM yang dimiliki	Komposisi pegawai Badan Keuangan Daerah berjumlah 69 PNS	Kasubbag. Umum	PPID Pembantu				
1.07	Profil Kepala Badan Keuangan Daerah	Nama : Kurniadi Maulato, S.sos., M.Si NIP : 197005101990031006 Jabatan : Kepala Badan Keuangan Daerah Pangkat Gol/Ruang : IV C / Pembina Utama Muda Pendidikan : S2		Kasubbag. Umum dan Kepegawaian		Hard copy		www.bkd.karanganyarkab.go.id
1.08	LHKPN	LHKPN Kepala Badan Keuangan Daerah yang telah di umumkan						E-LHKPN
2	Ringkasan Program & Kegiatan yang sedang dijalankan							
2.01	Nama program & kegiatan	1 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 2 Program Pengelolaan Keuangan Daerah 3 Program Pengelolaan Barang Milik Daerah			2024	Hard copy		DPA BKD

		4 Program Pengelolaan Pendapatan Daerah						
2.02	Penanggung Jawab & Pelaksana Program			Kepala Badan Keuangan Daerah				
2.03	Jadwal Pelaksanaan Program / Kegiatan	Berisi tentang daftar penanggung jawab masing-masing program kegiatan Badan Keuangan Daerah Tahun Anggaran			2024	Hard copy		DPA BKD
3	Ringkasan Kinerja yang telah dilaksanakan							
3.01	Penilaian kinerja BKD tahun sebelumnya	Berisi Laporan Kinerja BKD Tahun 2023			2024	Hard copy		
3.02	Laporan seluruh Program & Kegiatan yang telah dijalankan			Kasubbag. Perencanaan				
3.03	Laporan Umum & Kuangan tahunan BKD	Berisi informasi mengenai informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak			2024	Hard copy		
3.04	Realisasi Penyerapan Progam dan Kegiatan	Berisi informasi mengenai realisasi pelaksanaan program kerja Laporan realisasi penyerapan program dan kegiatan			2024	Hard copy Soft copy		
4	Laporan Keuangan							
4.01	NERACA 2024	Berisi Informasi Neraca Badan Keuangan Daerah			2024	Hard copy		
4.02	RKA 2024	Memuat Informasi Keuangan dan Anggaran Tahun 2024			2024	Hard copy		
4.03	CALK 2024	Berisi informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisa atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan		Kasubbag. Keuangan	2024	Hard copy		
5	Ringkasan Laporan Akses Informasi Publik							
5.01	Jumlah Permohonan Informasi Publik Yang Diterima	Berisi permohonan data		Kasubbag. Umum dan Kepegawaian				
5.02	Jumlah informasi permohonan publik yg di kabulkan	Berisi permohonan data yang di ijinan						
5.03	Jumlah informasi permohonan publik yg di tolak	Berisi permohonan data yang di tolak						
6	Pengumuman Pengadaan Barang dan Jasa							
6.01	Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa	Proses Pengadaan Barang dan Jasa BKD Tahun 2021		PPKOM				
6.02	Pengumuman Proses Pengadaan	Pengumuman Proses Pengadaan Barang dan Jasa BKD Tahun 2021		Kasubag Perencanaan	2024	Soft copy		SIRUP
7	Informasi tentang Peraturan, Keputusan dan Kebijakan							
7.01	Daftar Rancangan Proses Peraturan	Berisi Daftar yang memuat produk hukum BKD yang akan		JP2HD		Hard copy		
7.02	Daftar Peraturan dan Keputusan yang Telah Ditetapkan	Berisi daftar yang memuat produk hukum BKD yang telah terbit.		Ka badan		Hard copy		

B.DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN BADAN KEUANGAN DAERAH

NO	Sumber Informasi	Konten Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu pengecualian	KONSEKUENSI	
					Akibat jika info di buka	Manfaat jika Info di tutup
1	BADAN KEUANGAN DAERAH	Rencana Pelaksanaan tukar menukar/pemindahtanganan Aset	UU 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf a angka 4	Sampai dengan penandatanganan berita acara serah terima	Mengganggu/berpengaruh terhadap penataan siklus pengelolaan barang Daerah	Memudahkan pelaksanaan pemindahtanganan siklus PBD
2		Database obyek pajak dan retribusi	-UU 14 tahun 2008 pasal 17 huruf j	Tidak terbatas	Penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berhak	Melindungi/ mengamankan database obyek pajak dan retribusi
3		Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)	-Undang-undang No.10 Tahun 1998 tentang perbankan Pasal 1 angka 28 -Perpu Nomor 1Tahun 2017 tentang Akses informasi Keuangan untuk kepentingan perpajakan	Saat diperlukan kepentingan perpajakan penyelesaian piutang bank,kepentingan peradilan pidana dan perkara perdata antar bank	Melanggar UU kerahasiaan Bank (kecuali untuk kepentingan seperti pengecualian)	-Melindungi kepentingan pihak-pihak yang tercantum dalam SP2D -Tidak melanggar UU
4		Database Wajib Pajak	1. pasal 17 huruf h, UU No.14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi 2. ketentuan khusus Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah	Tidak terbatas	Penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berhak	Melindungi data Wajib Pajak

Karanganyar, 12 Februari 2024

**KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR**



KURNIADI MAULATO, S.Sos.,M.Si.

Pemula Utama Muda

NIP. 197005101990031006

